****

**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**Focus Group Discussion**

**“IMPLEMENTASI STRATEGI BERBASIS BALANCED SCORECARD**

**UNTUK PENINGKATAN KINERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN”**

Jakarta, 17 Mei 2017

Penggunaan BSC adalah dalam rangka melaksanakan amanat Reformasi Birokrasi (RB) khususnya program penguatan akuntabilitas dan dalam rangka meningkatkan kinerja. Berdasarkan laporan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2015 realisasi nilai RB untuk tahun 2015 adalah 70,51 persen, yang berarti belum menunjukkan peningkatan yang maksimal karena masih jauh di bawah target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam renstra sebesar 90-100 persen di tahun 2019. Tujuan diskusi ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menentukan dalam implementasi strategi pada KKP, kemudian mengevaluasi implementasi BSC di KKP jika ditinjau dari prinsip-prinsip organisasi yang berfokus pada strategi (*Strategy-Focused Organization*), dan yang terakhir menganalisis apakah BSC telah dipahami dan digunakan dengan baik oleh para pimpinan dan pegawai KKP untuk pencapaian strategi organisasi.

“Keberhasilan implementasi strategi KKP di ditentukan oleh faktor-faktor kualitas tahapan strategi dan faktor-faktor pendukung implementasi strategi. Di antara faktor-faktor kualitas tahapan strategi, kejelasan indikator kinerja berbasis posisi mempunyai nilai yang paling tinggi dan yang paling rendah nilainya adalah kejelasan penilaian kinerja. Untuk faktor pendukung yang paling menentukan adalah program manajemen perubahan, sedangkan faktor pendukung yang masih kurang dan harus diperbaiki adalah dukungan anggaran dan peran unit manajemen strategi. Dapat disimpulkan juga bahwa ditinjau dari lima prinsip *Strategy Focused Organization*, level implementasi *balanced scorecard* untuk pencapaian strategi oleh para pimpinan sudah baik. Namun pemahaman pegawai secara keseluruhan terhadap *balanced scorecard* masih belum baik.”

***(Muhammad Aris Nurcholis, Sekolah Bisnis IPB)***

“Penggunaan *Balance Scorecard* (BSC) ini biasanya digunakan di perusahaan, namun yang menarik metode ini digunakan di institusi pemerintah yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Judul sudah komunikatif dan dari sisi substansi juga sudah baik, tulisan ini layak muat dengan tingkat kelayakan paling tinggi.”

***(Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, MS, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian)***

Dalam rangka melaksanakan amanat reformasi birokrasi khususnya program penguatan akuntabilitas serta dalam rangka meningkatkan kinerja, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan kebijakan untuk mengimplementasikan manajemen kinerja dengan pendekatan *balanced scorecard* dalam proses penyusunan rencana strategis sejak tahun 2013. Dapat disimpulkam bahwa keberhasilan implementasi strategi di Kementerian Kelautan dan Perikanan ditentukan oleh faktor-faktor kualitas tahapan strategi dan faktor-faktor pendukung implementasi strategi. Di antara faktor-faktor kualitas tahapan strategi, kejelasan indikator kinerja berbasis posisi mempunyai nilai yang paling tinggi dan yang paling rendah nilainya adalah kejelasan penilaian kinerja. Untuk faktor pendukung yang paling menentukan adalah program manajemen perubahan, sedangkan faktor pendukung yang masih kurang dan harus diperbaiki adalah dukungan anggaran dan peran unit manajemen strategi.